

1991

FOKUS PERHATIAN

KEARIFAN DAN KEPATUTAN

Oleh : Aswino *)

BEGITU "Bhayangkara" Nomor 14/1990 sampai di haribaan pembaca, tiba-tiba topik pemberitaan yang berkisar pada persatuan dan kesatuan, kebebasan dan keterbukaan, kesetiakawanan sosial, serta kearifan dan kepatutan muncul secara lebih sering, lebih menggelitik, dan lebih tajam-mendalam. Baik terhadap kasus-kasus dalam negeri seperti "Opera Kecoa", "Majalah Tabloid Monitor", dan "Rumahku Langitku", maupun terhadap "Krisis dan Perang Teluk" misalnya. Keterbukaan, kearifan dan atau kepatutan telah dijadikan pisau analisis terhadap setiap permasalahan yang peka dan menyangkut orang banyak. Di lingkungan Polri sendiri tidak kurang dari Kapolri Drs. Haji Mochamad Sanusi sendiri yang mengetengahkan berbagai masalah strategis dengan pisau analisis demikian. Jenderal Sanusi di hadapan para Pamen Senior dan Pati Mabes Polri dan sekitarnya pada tgl. 26 November 1990 di "Wisma Bhayangkari" menyatakan perlunya sikap arif dalam mengopdinkan profesionalisme Polri secara kesinam-

bungan, sebagaimana telah digaris-kan oleh ketiga Kapolri terakhir, sehingga tidak perlu ada lagi terdengar suara-suara yang kurang tepat menilai bahwa "ganti Pimpinan, ganti pula kebijakan/kebijaksanaannya".

PERINTAH HARIAN PANGAB

Sebelum menutup amanatnya menyambut Hari ABRI ke-45 melalui RRI-TVRI, dengan mohon perkenan Tuhan Yang Maha Esa untuk membimbing bangsa Indonesia, maka Pangab mengetengahkan 4 (empat) butir ajakan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta 5 (lima) butir Perintah Harian untuk segenap prajurit ABRI di manapun mereka berada dan bertugas.

Keempat ajakan tersebut meliputi: Pertama, agar kita mengarahkan pandangan ke depan, guna membaktikan diri dalam pembangunan, demi kebesaran dan kejayaan masa depan bangsa Indonesia, dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila, UUD-45 dan Wawasan Nusantara.

Kedua, senantiasa berorientasi ke-

*) Nama sandi, Staf Redaksi majalah "Bhayangkara".

pada sikap dan perilaku konstitusional, yang bercirikan musyawarah untuk mencapai mufakat, , yang mendukung iklim pembangunan serta persatuan dan kesatuan Nasional.

Ketiga, tetap memelihara kewaspadaan Nasional.

Keempat, mewaspadaikan kemungkinan pengaruh yang tidak menguntungkan dari globalisasi yang sedang berlangsung di dunia saat ini, dengan terus meningkatkan vitalitas kemampuan dan ketahanan di semua sektor kehidupan Nasional.

Dari kelima butir Perintah Harian Pangab, butir ketiganya terdiri dari tidak kurang 7 (tujuh) serta 8 (delapan) prinsip dan keharusan ABRI/Polri bertingkah laku di tengah-tengah rakyat, sehingga cukup banyak butir yang harus dipatuhi secara lebih konsisten. Perintah Harian pertama, seluruh prajurit ABRI harus memelihara dan meningkatkan terus kemandirian dan jiwa integrasi ABRI, guna menjamin kekompakan dalam menghadapi tugas dan tantangan di masa mendatang yang semakin berat dan kompleks. Butir berikutnya berisi keharusan terus memelihara dan meningkatkan kemandirian iklim kemandirian ABRI - Rakyat. Butir ketiga, agar mewujudkan secara lebih nyata peningkatan kualitas kepemimpinan dan komunikasi sosial ABRI, serta implementasi 8 Wajib ABRI di setiap lingkungan kehidupan masyarakat. Berikutnya, agar segenap prajurit ABRI, baik sebagai

kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik, yang didukung oleh semangat kejuangan yang tinggi sehingga mampu mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak pesat dan semakin canggih. Terakhir, Pangab memberikan perintah agar ABRI terus meningkatkan keikutsertaan dan peran pengabdian ABRI dalam menyiapkan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi suksesnya pelaksanaan Pelita V serta menyongsong dimulainya era tinggal landas.

Ilmu Komunikasi yang juga didalami di PTIK merumuskan bahwa komunikasi sosial yang memiliki berbagai model, sistem dan pengembangan itu pada hakekatnya diarahkan ke titik fokus yakni terciptanya integrasi sosial. Makna integrasi sosial ini lebih bermakna umum, universal, mondial, serta lebih mendasar daripada integrasi nasional misalnya, ataupun integrasi ABRI. Namun demikian dibandingkan dengan eksistensi "The Armed Forces" serta "Police Force" berbagai negara, ABRI/Polri memang telah diketahui memiliki karakteristik faktual sejak merebut, mempertahankan, menata, dan bersama-sama mengisi kemerdekaannya, sampai dengan memberikan warna integrasi atas kiprah pembangunan Nasionalnya. Oleh sebab itu ABRI/Polri dituntut harus semakin melaksanakan fungsinya yang secara konseptual terdiri dari :

Pertama, ABRI sebagai pejuang di samping sebagai prajurit. Kedua, kemanunggalan ABRI dengan Rakyat. Ketiga, ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator.¹

Dari konsepsi ini ABRI sadar ataupun tidak sadar telah mengembangkan integrasi ABRI menuju ke integrasi nasional, yang sebenarnya lebih mendasar daripada sekedar ber-Dwifungsi ABRI. Oleh pers Barat Dwifungsi ABRI ini hampir selalu "hanya" dikaitkan dengan sekedar keberhasilan serta kemanfaatan kegiatan yang didapat masyarakat dari "Operasi AMD".

Integrasi sosial dan integrasi nasional berisi sejumlah jabaran butir-butir makro, yang daripadanya perlu "terjemahan" sesuai dengan profesionalisme ABRI. Oleh karena itu penekanan Pangab dalam butir ketiga yang menyangkut komunikasi sosial tersebut di atas perlu kitaantisipasi dengan bertanya diri, sudahkah kita semua mengerti makna dan bagaimana mengaplikasikan "Tujuh Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial ABRI" itu. Bertanya diri serta merenungkannya yang lazim disebut mawas diri tersebut mutlak perlu kalau ABRI/Polri tidak ingin terjerumus menjadi sekedar "macan kertas" ataupun "singa mimbar yang ompong", yang cepat ataupun lambat dapat mengurangi kredibilitas serta wibawa ABRI/Polri.

Sejumlah pakar dan peneliti masalah Cina di Lemhannas pernah meragukan kebenaran prediksi Dr.

Abdul Salam yang pengkaji UI di perihal "kerapuhan Maoisme" di Republik Rakyat Cina "yang perkasa" itu.² Dan dari halaman 106 sampai 113 tersirat sinisme bahwa kebesaran dan keperkasaan Cina dan mao tidak lebih dari sekedar "Pagoda Kertas"; suatu sindiran tajam yang ternyata kemudian terbukti dengan warna sifat kerakyatannya walaupun dalam himpitan kekuatan negara-negara Adidaya dan Jepang itu.

Marilah kita simak kembali ketujuh asas tersebut di atas :

1. Konstitusional.
2. Mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan penanggulangan agar tidak terdadak.
3. Kemanusiaan.
4. Kekeuargaan dan kegotong royongan.
5. Mendidik dan menanamkan kemampuan.
6. Mengayomi dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan.
7. Persuasif, ialah meyakinkan orang lain agar mereka menyadarinya sebagai keyakinannya sendiri dan melahirkan rasa tanggung jawab.³

Kalau kita mau jujur maka cukup banyak bukti bahwa kita sudah lupa di mana ketujuh butir itu terdapat, dan bahkan sudah banyak yang tidak lagi memiliki "Buku Saku/Buku Pinter" yang pernah dibagikan itu. Kelalaian menyimak hal ini jelas merupakan kerawanan atas hakekat tujuan integrasi ABRI, baik intern maupun dengan lingkungannya. Dalam hubungan dengan kerawanan ini Pimpinan ABRI telah menggariskan apa yang harus

diperbuat anggota ABRI terhadap lingkungannya sebagaimana tertuang dalam "Delapan Wajib ABRI", yang terdiri dari :

Pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat.

Kedua, bersikap sopan santun terhadap rakyat.

Ketiga, menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Keempat, menjaga kehormatan diri di muka umum.

Kelima, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan.

Keenam, tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Ketujuh, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesusilaan rakyat sekelilingnya.⁴

Ke-8 butir petunjuk sikap ABRI/Polri terhadap rakyat umum dan wanita ini di negara dan lingkungan AB Inggris dikenal dengan "chivalry" (kekesatriaan) dengan penampilan para prianya yang berwatak "gentleman".

Bahwa ABRI/Polri harus bersifat kesatria adalah jelas karena setiap Apel Bendera kita selalu mengucapkan Sapta Marga, yang butir ketiganya berbunyi : Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan."⁵ Dalam pelaksanaan "persuasif" (butir ke-7 KKS) tersebut diperlukan dua langkah statis (sebelum operasional) yakni :

Pertama, mengenal kondisi/kekuatan diri serta masyarakat selaku

"lawan" (istilah dalam perang), berdasarkan "SWOT analysis" (strength, weakness, opportunity, and threat) sehingga tidak ada sikap yang meremehkan dan atau terlalu tinggi berharap dari obyek yang dihadapi.

Kedua, mengenal dengan saksama lima komponen penentu berhasil tidaknya suatu komunikasi sosial berproses, yakni :

ABRI/Polri selaku komunikator; pesan/misi/idea/materi komsos apa yang hendak diketengahkan; wahana/cara/metoda/saluran/channel efektif dan efisien mana yang akan kita pilih; keempat, apa/ siapa pihak yang akan dituju sebagai komunikan; kelima, apa hasil/sasaran/tujuan/goal yang diharapkan akan muncul.

Dari butir ketiga Perintah Harian Pangab tersebut mutlak perlu dibakukan persyaratan minimal bagaimanakah bagi seorang prajurit ABRI "yang memiliki kualitas kepemimpinan dan komunikasi sosial ABRI" itu. Sejalan dengan paparan tentang "penetapan tolok ukur kondisi Ketahanan Nasional tahun 2000" yang setiap gatra diberi bobot gatra, parameter, bobot para meter, kualifikasi bobot, serta bobot kuantitatifnya,⁶ maka setiap butir "7 Asas KKS" pun perlu segera dijabarkan demikian agar diperoleh gambaran KKS yang faktual, aktual, dan valid. Dan sejalan itu jabaran tentang PTIK yang diinginkan mantan Kapolri, maka menjadi kewajiban kita untuk sesegera mung-

kin menerjemahkan apa yang dimaksud dengan "PTIK sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian"?

Sejak berdirinya 45 tahun yang lalu, PTIK selalu mengikut sertakan dan membuka tangan atas partisipasi spontan para pakar/ilmuwan yang juga banyak menulis tentang polri, akan tetapi masih belum "menggelitik simpatisan" ABRI seperti Nasrudin Hars, Arnold Baramuli, Ny. Kemala Motik A. Gafur, serta para tokoh pers, untuk menulis tentang PTIK sebagai Perguruan Tinggi kedinasan tertua di Republik kita itu. Bagaimanapun, semakin banyak kritik, semakin banyak pula masukan yang dapat dimanfaatkan.

INTEGRASI

Kita sering kurang peduli akan kebenaran ucapan bahwa "memperhatikan lebih berat daripada merebut kemerdekaan", demikian pula atas prediksi Pangab pada butir pertama yakni bahwa kita masih harus memelihara dan meningkatkan terus kemantapan dan jiwa integrasi ABRI. Salah satu akibat langsung atas sikap tak peduli itu adalah terjadinya peristiwa yang mencoreng muka kita semua yakni "Penyerangan Makowiltabes Surabaya oleh sekitar 90 orang oknum ABRI yang membawa korban sejumlah anggota Polri pada tanggal 24-11-1990). Siapapun wajib merasa "kecolongan" dan tidak hanya

mengatakan terperanjat, karena di "Kota Pahlawan" tersebut baru saja digelar secara kolosal peristiwa historis perang rakyat semesta" 10 November 1945" (dalam tema SEMANGAT 10 NOVEMBER AREK-AREK SURABAYA) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Surabaya.

Para pemuda-pemudi, seniman, ABRI/Polri, dan para veteran telah berpentas drama alegoris dengan teknik tata sinar serta tata suara yang prima sedemikian rupa memukanya, yang membuat penonton "mongkog" (bergetar kembali jiwa kejuangan/patriotismenya, dan tidak sedikit di antaranya penulis lihat sendiri, mengusap air matanya. Beberapa menteri dan pejabat tinggi Jakartapun nampak hadir di situ.

Kenyataan yang timbul dua pekan kemudian jelas : Adanya sebuah disintegrasi. Mudah-mudahan ungkapan/pepatah "tidak ada prajurit yang salah . . ." masih berlaku dalam menangani kasus prinsipil ini.

Salah satu wahana terwujudnya integrasi adalah terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu dalam forum apapun yang menyangkut kepentingan bangsa, Pangab kemudian memperingatkan akan menindak dengan tegas siapapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terakhir ditujukan terhadap kemungkinan perbuatan disintegrasi sebagai dampak "Perang Teluk" (KOMPAS tgl. 5-2-91 : PANGAB,

RI TIDAK MENTOLERIR TERORISME).

Pemulihan hubungan diplomatik RRC-RI tgl. 8 Agustus 1990 pun perlu segera dikaitkan dengan hakekat integrasi yang penuh tantangan dengan WNI dan WNA etnik Cina. Baik dari pihak Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) maupun pihak "pribumi" beranggapan bahwa masalah integrasi/asimilasi ini telah dianggap semakin mendesak.

Presiden Suharto sejak lama telah menghimbau: "Kami serukan kepada Warganegara Indonesia keturunan Cina untuk TIDAK MENUNDA-NUNDA lagi berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. . . ."8)

Asimilasi dan integrasi tercatat menonjol di Jawa Tengah pada saat "Perang Kuning", yang kemudian mengalami banyak kendala dan tantangan. Apa yang telah dilakukan baik oleh Bakom PKB maupun oleh almarhum Mas Agung dan kawan-kawan untuk masuk Islam, telah memberikan warna serta apresiasi timbal balik yang positif. Dicitak ulanganya buku LAHIRNYA KONSEPSI ASIMILASI tahun 1977 telah pula tercatat sebagai salah satu bukti jawaban apresiatif atas himbuan presiden. Eksistensi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pun dapat dianggap sebagai sikap integratif apresiatif yang merealisasikan panggilan integrasi dan asimilasi go-

longan atas. Yang kini menjadi pertanyaan ialah sejauh mana efisiensi dan efektivitas kepanutan-an CSIS dan Bakom PKB terhadap sekitar 3,5 juta keturunan Cina golongan menengah dan bawah. Nampaknya getaran integrasi dalam program-program nasional seperti keluarga berencana, siskamling, profesionalisme di bidang/lahan non-ekonomis dan non-dagang masih sangat langka mereka geluti. Partisipasi dalam pengalaman P-4 apalagi. Penjiwaan, tentang Wasantara maupun Tannaspun masih jauh dari harapan, sementara percepatan perkembangan iptek, komunikasi dan informasi begitu cepatnya.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau sebagian dari kita masih belum tahu bahwa jumlah pulau-pulau di republik ini bukan 13.667 lagi melainkan 17.508. Demikian juga halnya apa yang dituangkan oleh cendekiawan/ilmuwan ABRI F.M. Parapat, Ph.D. perihal "25 butir tolok ukur guna mengetahui kadar implementasi Wawasan Nusantara dan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia".9)

Dan kerawanan integrasi kita ternyata telah disinggungnja juga dalam butir ke-4 paparannya yang dikatakan bahwa integritas integrasi nasional erat kaitannya dengan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial, rasa cinta dan kerelaan berkorban untuk nusa bangsa, komunikasi sosial dan keterbukaan, serta dalam hubungannya dengan kebudayaan nasional sesuai "Bhinneka Tunggal Ika".

KETERBUKAAN

Belum lama isyarat peniadaan pencabutan SIUPP/pembreidelan diumumkan, sejarah keburu berulang : Mingguan tabloid "MONITOR" pada akhir Oktober 1990 telah dibreidel dan salah seorang penanggung jawabnya, Arswendo Atmowilopo, terkena sanksi hukum serta ditahan. Walaupun hampir terlambat, berbagai reaksi massa baik perorangan maupun kelompok terhadap Arswendo, telah berhasil ditangkal serta disublimir dalam wadah dan saluran yang komunikatif serta tidak eksplosif, keras, kasar, dan beringas. Upaya proporsional menuntaskannya secara hukum dari semua pihak, benar-benar patut dihargai.

Memasuki teras Era Tinggal Landas (PJPT II) sekarang ini masalah keterbukaan diharapkan mampu membuat terang benderang, obyektif, "plong dan sreg" (lega dan tidak terpaksa), dan partisipatif aktif (termasuk korektif) dalam proses akselerasi pembangunan nasional. Tidak kurang dari Soetjipto Wiro-sardjono, Prof. Kusnadi Hardjasu-mantri, berbagai forum BP-7, dan bahkan Presiden Suharto, yang telah mengisyaratkan pembudayaan keterbukaan tersebut.

Mimbar BP-7 nomor 45 tahun VIII-1990 halaman 37 telah mengetengahkan artikel berjudul "URGENSI KETERBUKAAN IDEOLOGI DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK".

Prof. Kusnadi dalam Mimbar BP-7 nomor sebelumnya halaman sampul belakang mengemukakan: "Sikap keterbukaan adalah kondisi mental (a state of mind), suatu sikap yang tumbuh dari dalam diri manusia itu sendiri, untuk menghargai harkat dan martabat manusia lain dan dengan demikian bersedia membuka diri dalam interaksi personal." Dalam pada itu di KOMPAS MINGGU tanggal 26 Agustus 1990 halaman 11 dalam judul DEKON (Asal-Usul) Soetjipto Wirosardjono berkata : "Dan menurut Presiden Suharto, demokrasi memang membutuhkan banyak musyawarah, diskusi, tukar menukar pikiran dan dialog."

Agaknya keterbukaan tersebut tidak dapat kita geser kedekatannya dengan hakekat demokrasi, dalam hal ini Demokrasi Pancasila.

Oleh sebab itu ada baiknya kita simak judul tulisan yang berbunyi **BEDA PENDAPAT HANYA UNTUK BEDA PENDAPAT, BISA MENGHANCURKAN DEMOKRASI** (KOMPAS MINGGU tanggal 21 Oktober 1990 halaman 1), di mana Presiden Suharto memberikan butir-butir sebagai berikut :

"Telah lama kita menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka."

"Telah lama kita bertekad menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang terbuka."

Keterbukaan tidak terpisah dari kepentingan kesatuan-persatuan dan tanggung jawab sosial sebagai-

mana ditegaskan Presiden Suharto: "Tugas bersama kita adalah menjaga agar keterbukaan itu tidak menjadikan bangsa kita bercerai berai, melainkan bertambah bersatu dan bertambah segar."

"... keterbukaan jelas memerlukan tanggung jawab semua pihak yang semakin besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu, untuk menjamin kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta mendekatkan kita pada tujuan nasional."

Keterbukaan yang berkait erat dengan Demokrasi Pancasila serta fungsi sosial manusia tersebut jelas merupakan wahana dasar serta mendasar untuk berinteraksi baik secara individu maupun secara kelompok dalam rangka integrasi nasional. Oleh sebab itu hakekat makna keterbukaan tidak lain adalah "Sistem komunikasi yang mencerminkan kondisi mental yang terpancar dalam sikap dan tingkah laku manusia untuk menghargai harkat dan martabat pihak lain sedemikian rupa sehingga diperoleh kesediaan untuk saling membuka diri untuk menerima apa yang disampaikan pihak lain dalam suatu interaksi." Sistem yang dipatuhi dengan tulus, cepat atau lambat akan melahirkan budaya, melalui pembiasaan-pembiasaan. Dari keterbukaan tersebut terkandung makna kematangan kejiwaan (psychological maturity) yang mandiri serta kemandirian budaya untuk berinteraksi. Dari penalaran dan wawasan tentang keterbukaan tersebut maka si-

fat-sifat arif serta keparipasan/kepatutan seseorang amat menentukan warna keterbukaan dimaksud.

KEARIFAN

Manakala bangsa Indonesia dalam berbagai strata sosial dan pola budaya berikut tradisi yang dihormatinya melaksanakan keterbukaan, jelas tidak ada hubungannya (relevansinya) dengan keberhasilan Presiden Mikhael Gorbachev (relevansinya) dengan keberhasilan Presiden Mikhael Gorbachev dengan "keterbukaan gaya Uni Soviet" yang kita kenal dengan sebutan Perestroika. Demikian pula halnya dengan tidak adanya relevansi antara deregulasi, Pakto/Pakno/Pakdes, dan lain-lain kebijaksanaan ekonomi Indonesia dengan "Glasnost Rusia". Kedua bangsa mempunyai latar belakang serta motivasi masing-masing yang secara rasional dan integral didayagunakan untuk kesejahteraan bangsanya.

Secara ideal dan filosofis maka dasar lahirnya kebijakan adalah adil, halal, terbebas dari deviasi serta iktikad koruptif. Oleh sebab itu apabila diterapkan dalam kehidupan manusia tidak akan mengganggu keselarasan-keserasian-keseimbangan. Baik secara horisontal antara sesama umat maupun secara vertikal dengan Yang Maha Kuasa. Maka itu kebijakan dirumuskan sebagai kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Dan berbicara tentang kebijakan orang tidak dapat

memisahkannya baik dengan kebijaksanaan ataupun kearifan, maupun dengan keterbukaan serta kepatutan.

Tidak kurang dari para moderator atau pakar berbicara tentang keterbukaan, kearifan, dan kepatutan dalam berbagai forum pertemuan. Salah seorang di antaranya adalah Pangab yang berbicara tentang kearifan di hadapan para peserta Musyawarah Nasional (Munas) Forum Komunikasi Putra-Putri ABRI (FKPPI) tanggal 24 November yang lalu. Ajakan Pangab itu mungkin dinilai mengada-ada. Masalah kearifan saja mengapa mesti mengacu dan mensitir pengemukaan Pangab. Apalagi di kalangan generasi II ABRI/Polri yang terdiri dari golongan terpelajar/amat terpelajar (istilah UI bagi lulusan S.1 dan S.2 ke atas, pen.), bukan ?

Secara umum kata "arif" bermakna bijaksana; cerdas pandai; berilmu; atau juga tahu atau mengetahui. Dengan demikian kearifan berarti kebijaksanaan, yang berarti menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan; dan dalam forum pemerintahan atau partai dan sebagainya berarti pimpinan dan cara bertindak. Kata "arif bijaksana" sebagai kata majemuk diartikan sebagai kedalaman kedua arti kata tersebut secara terpadu. Dalam pada itu kata bijaksana biasanya dibedakan dengan kata bijak, terutama secara stratifikatif. Akan tetapi nuan-

sa bahasanya (perbedaan halusnya) cukup sulit dibedakan secara tajam, terutama karena sering terjadi maksud maknawi yang tumpang tindih. Kita lihat saja apa perumusan kata kebijakan oleh kamus-kamus umum, yakni kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan. Apakah ini berarti bahwa kearifan sama dengan kebijaksanaan dan kebijakan, tidak semutlak itu. Bergelut dengan bahasa selalu menarik manakala kita berorientasi kepada fungsinya yang komunikatif dan luwes; antara lain bahwa makna kata itu dapat mengembang (wide in meaning) dan atau menyempit (narrowing in meaning). Untuk memperoleh kejelasan, baik kiranya kita simak makna awal yang membedakan kedua kata tersebut :

Kebijakan ialah "skill, ability, capability, insight". Kebijaksanaan ialah "understanding, intellect, cleverness, tact, statesmanship, policy (dan juga, pen.) insight". Dengan demikian mana yang makro dan mikro seandainya harus dibedakan secara tajam, tergantung kepada kesepakatan (konsensus) kita pemakai bahasa Indonesia.

Masih ada kaitannya dengan prediksi tentang mutlak perlunya integrasi nasional, Pangab Jenderal Try Sutrisno pada tanggal 24 November 1990 di hadapan peserta Musyawarah Nasional (Munas) IV FKPPI telah mengungkap kembali peranan keARIFan tersebut. Ditekannya "... , dan oleh karena itu semua pihak hendaknya mena-

ngani kedua isu tersebut (SARA dan kesenjangan sosial, pen.) secara arif dan bijaksana." Selanjutnya diketengahkan "bila isu-isu tersebut tidak segera ditangani secara arif dan bijaksana, itu tidak hanya akan mengganggu jalannya pembangunan yang sedang kita laksanakan, tetapi juga dapat mengakibatkan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan" (KOMPAS MINGGU, 25 November 1990 halaman 1, dalam judul "PANGAB: TANGANI ISYU SARA SECARA ARIF"). Oleh sebab itu FKPPi selaku "generasi kedua/penerus" jiwa kejuangan ABRI/Polri saja telah mendapatkan PERINGATAN (warning) perihal kearifan, maka jelas bahwa bagi ABRI/Polri generasi kini dan sebelumnya, "peringatan" Pangab tanggal 4 Oktober 1990 dikaitkan dengan tindak disintegrasi tanggal 24 November 1990 harus kita terjemahkan lebih tajam, bersangsi proporsional, dan penuh kearifan.

KEPATUTAN

Banyak kasus Kamtibmas yang ditangani hanya dari sisi sekuriti yang sering kurang manusiawi. Lebih banyak lagi kasus-kasus dalam proyek-proyek pembangunan yang menjadi isu nasional karena sama sekali mengabaikan dampak-dampak prosperiti atas diri mereka yang terguncang, terdesak, mereka yang serba kecil-serba lemah/kalah-seadanya-penurut, dan yang selalu dapat menjadi obyek/korban. Dalam ka-

sus-kasus pertanahan yang populer dengan sebutan penggusuran misalnya. Dengan dalih "untuk kepentingan umum" maka sebagian proyek pembangunan telah cukup banyak membuat ketelantaran, ketakutan, kecemasan, kemelaratan dan atau ketidakpastian; yang cukup sering pula membawa korban harta/jiwa pula. Setelah tergusur tidak sedikit yang menghadapi kesulitan yang paling esensial di DKI yakni masalah KTP di tempat baru. Kecuali di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, masalah KTP mereka yang tergusur menuju ke wilayah-wilayah Jawa Barat, sering membawa kesulitan kedua terutama di bidang ketenagakerjaan yang sering mewajibkan pemilikan KTP DKI Jakarta.

Setiap warganegara yang tidak acuh tak acuh akan hakekat integrasi nasional akan dengan mudah mengutarakan isu-isu yang muncul sebagai resultante problematika kita bersama yakni apa yang dimaksud dengan "umum.. serta "untuk kepentingan umum". Sudahkah validasi maknawinya relevan dengan pasal 33 UUD-1945 dan lain-lain perkiraan dampak yang kurang menguntungkan bila tidak dikaitkan dengan Astagatra. Sudah pulakah difokuskan, bahwa apa, kapan, dan di manapun kita membangun (juga untuk kawasan Indonesia Bagian Timur/IBT) harus membuahakan kesejahteraan yang adil dan merata. Apabila tidak maka kesenjangan yang ada kini, yang sedang kita halau, hanya akan

menghasilkan keluaran berupa memindahkannya ke IBT. Oleh sebab itu munculnya gagasan untuk meninjau kembali perundang-undangan yang mengatur "masalah perantaraan" serta "masalah untuk kepentingan umum" (BERITA BUANA tanggal 1 Desember 1990 Tajuk Rencana: KEPENTINGAN UMUM, halaman 6) yang dipetik dari acara Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama dalam kaitannya dengan Permendagri No. 2/1976, patut kita beri acungan jempol. Kepentingan umumpun mau tak mau harus memperhatikan tercapainya pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) yang bertitik pusat pada dipenuhinya 9 (sembilan) bahan pokok kebutuhan hidup rakyat.

Dalam berbagai forum, baik pertemuan biasa sampai dengan diskusi, seminar, rapat-rapat biasa per korsa, rapat koordinasi, musyawarah, maupun kongres tingkat nasional, sejumlah moderator dan pimpinan pertemuan sekali-sekali telah mulai membicarakan masalah/pencapaian kata kepatutan atau kepatutan termasuk mantan Kapolri tanggal 26 November 1990 yang lalu. Meskipun istilah ini baru dimunculkan tetapi patut diperhatikan karena erat hubungannya dengan keterbukaan serta kearifan. Adalah naif (celaka, tak masuk akal) dan bahkan munafik apabila menapak ke era Pembangunan

Jangka Panjang Tahap II nanti, kaum terpelajar masih terbuai dalam ayunan budaya tidak peduli (acuh tak acuh) terhadap lingkungan. Sama halnya dengan kebutuhan akan keterbukaan dan kearifan maka warna KEPATUTAN agaknya perlu direnungkan karena amat mungkin merupakan faktor penentu serta terjemahan parameter keterbukaan dan kearifan yang semestinya tadi, yakni keselarasan-keseerasian-keseimbangan.

Dalam konteks ini Menhankam L. B. Moerdani di UPN Veteran Yogyakarta (KOMPAS tanggal 15 Desember 1990 halaman 11 dalam judul KUNCI PEMBINAAN SUMBER DAYA ADALAH PEMBENTUKAN KEMANDIRIAN) setelah merumuskan arti keterbukaan dan peran kemandirian dalam keilmuan telah menyimpulkan bahwa masalah kebebasan terkait erat dengan keterbukaan yang bertanggung jawab sebagaimana dikatakan di Yogyakarta, yakni :

"Masalah lain yang terkait dengan kebebasan adalah keterbukaan. Namun keterbukaan bukan berarti buka-bukaan dan bukan pula berarti menelanjangi diri sendiri atau orang lain dari berbagai seginya."

Kebebasan dengan demikian bukan sekedar "liberte" ataupun "freedom" yang secara baku telah dirumuskan oleh "Revolutionary National Assembly". Kebebasan dan keterbukaan yang bertanggung jawab yang berada di dunia media massa telah digariskan oleh Deppen

cq Ditjen PPG serta dalam Kode Etik Jurnalistik.

Oleh sebab itu, demikian sering diketengahkan oleh seorang pakar dan pimpinan pengkajian tentang bahaya Latent Komunis dan Masalah Cina di Lemhannas berikut permasalahan khusus lainnya, masalah buka-bukaan, menelanjangi diri sendiri dan atau orang lain tersebut disebutkan sebagai tidak patut. Hubungan antar manusia, antar negara, termasuk tatakrama berdialog atau tukar menukar pendapat (exchange of views) akan semakin serasi apabila memperhatikan dan menerapkan adab kepatutan ini.

Selain itu Manhankam berbicara pula tentang kemandirian, yang secara analogis seperti halnya kebebasan dan keterbukaan, memerlukan "baju" kearifan dan kepatutan.

Kemandirian (asal kata "mandiri" menurut Dr. Th. Pigeaud berarti "manggon".¹⁰) Kata mandiri dipakai dalam istilah kemapanan dan kematangan pribadi ("mandireng" pribadi = mandiri ing pribadi). Dalam hubungan ini kemandirian tidak sekedar berarti "zelfstandigheids" atau "gevestigdzijn" ataupun "self-sufficiency" belaka melainkan bermakna" secara mantap berada dalam posisinya" yang mencakup banyak istilah (a.l. self-determination, self-possessedness/self-possession, self-reliance, dan self-willing). Oleh sebab itu tidak mengherankan bila kemandirian "negara boneka/satelit" serta "pemimpin/pejabat

drop-dropan yang karbitan" sering membudayakan ketidakarifan serta ketidakpatutan. Baru setelah kemandirian itu berkualitas demikian maka apa saja termasuk penerapan kebebasan, dapat dilakukan dengan bertanggung jawab.

Dari Menhankam masih ada satu penekanan yang patut kita simak yaitu : "... ada tiga hal yang harus dihayati dan diamalkan secara berurutan yaitu kemandirian, kebebasan dan keterbukaan di mana ketiga hal itu berada di dalam bingkainya kebersamaan."

Apa pula makna kebersamaan; adakah sekedar solidaritas ataupun toleransi ataupun sikap moderat yang sekedar dianggap merasa satu bahasa. Dari berbagai forum di media massa ataupun dari amanat-amanat baik dari Kepala Negara maupun para Menteri (Mensos RI, Menpora, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan lain-lain) secara implisit ada siratan yang membedakan makna kebersamaan di Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah dikaitkannya kebersamaan itu (periksa pidato-pidato dan tulisan menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional/HKSN yang berbarengan dengan Hari Ibu 22 Desember) dengan kebebasan, keterbukaan, kearifan, serta kepatutan tersebut di atas.

BUDAYA ARIF DAN TERBUKA

Dikaitkan dengan strategi kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap bangsa memiliki "national

out-look" yang bagi Indonesia kita sepakati bernama Wawasan Nusantara (Archipelagic Out-look), yang berakar dari realita kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya dikaitkan dengan perkembangan kehidupan internal serta eksternal secara alamiah-kodrati muncul wawasan yang dapat bersifat meluas serta yang menyempit/khusus/sektoral/kedaerahan-kesukuan-kebahasaan.

Di lingkungan negara-negara ASEAN telah lahir dan sedang dikembangkan "Regional (ASEAN) Out-look" serupa dan senafas wawasan "Mitreka Satata" di jaman kejayaan Kerajaan Majapahit-Sriwijaya bersama negara-negara Indo China terutama "Campa" dan "Cina Mandailing"; yang agaknya lebih dekat secara analogis dengan eksistensi "Regional Resilience" atau Ketahanan Regional ASEAN. Dan di berbagai tempat di daerahpun masih banyak yang dapat kita angkat ke permukaan kewawasan, tanpa bermaksud melemahkan Wawasan Nasional kita. Bagaimanapun "pusat" tanpa "daerah" tidak akan punya arti yang hakiki. Dalam santsanti saja misalnya, maka baik "Bhinneka Tunggal Ika" (nasional) maupun Tanhanna Dharma Mangrva" (sektoral/departemental cq non departemental, yakni di Lemhannas) yang keduanya sudah menjadi milik nasional ternyata diangkat dari satu kalimat kakawin Jawa Kuno berasal dari Jawa Timur yang berbunyi "Bhinneka Tunggal Ika,

Tanhanna Dharma Mangrva."¹¹) Bagaimanapun, kebudayaan Indonesia adalah kristalisasi/pengejawantahan dari puncak-puncak budaya daerah.

Apa hubungan wawasan tersebut dengan keterbukaan, kearifan, serta kepatutan? Diharapkan pada arus deras perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi dalam rangka modernisasi maka tampillah semakin lebih menentukan peranan manusia berikut kualitas manusianya. Teori futuristik "The Third Wave"nya suami isteri Toffler dan "Megatrend 2000"nya suami isteri Neisbitt tentang Indonesia mungkin benar, akan tetapi adalah lebih arif manakala kita tidak terlalu reaktif apalagi impulsif untuk bernafsu "mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain" semata, melainkan menoleh kembali ke dalam diri kita serta sejarah kebangsaan kita.

"Mawas ke dalam" demikian yang diaplikasikan dalam "SWOT Analysis" serta "Management Analysis" dalam menghadapi setiap permasalahan makro, pasti lebih menghasilkan produk usaha yang lebih selaras-serasi-seimbang dibandingkan dengan upaya-upaya yang rasional semata-mata. Masih banyak unsur irrasional yang perlu dimanfaatkan. Tindakan Arswendo Atmowiloto dkk. dalam forum "polling" pembaca tentang tokoh-tokoh yang paling disukai misalnya, telah secara rasional mencampur baurkan tokoh manusia biasa apapun kualifikasi/

klasifikasinya dengan Nabi/Rasul yakni Muhammad S.A.W. Akibat secara rasional pasti tidak ada. Akan tetapi dia disisi lain telah menggelitik, menusuk, dan mendi-dihkan darah gusar di hati umat Islam. Gejolak dan aksi massa sempat sebentar mewarnai cetusan hati nurani masyarakat Islam di Ibukota karena Arswendo dinilai tidak pantas/wajar/layak/senonoh/cocok/se-mestinya melakukan hal itu. Bahkan seandainya Muhammad S.A.W. ditaruh di nomor urut pertamapun pasti masih ada protes; bahkan tidak patut serta kurang arif untuk membuat ranking di kalangan Nabi dan atau Rasul sekalipun.

Dengan demikian, dihadapkan pada isu-isu kumulatif seperti SARA, kesenjangan sosial/pemera-taan/kebersamaan, dan (sistem/sis-tem kampanye) Pemilihan Umum, maka bangsa kita telah berhasil mencapai mufakat untuk mengang-kat keterbukaan, kearifan, dan ke-patutan sebagai perangkat yang menjamin iklim kebebasan yang bertanggung jawab sesuai makna Demokrasi Pancasila yang hakiki, serta iklim stabilitas nasional yang segar dan dinamis. Dengan demik-ian kalau ketiga istilah tersebut boleh kita sebut wawasan kebi-jaksanaan maka tidak berlebihan bahwa ketiganya merupakan wa-wasan yang melahirkan budaya ke-arifan yang diwarnai keterbukaan serta kepatutan.

SECERCAH HARAPAN

Namun demikian sejauh mana-kah iktikad baik serta kejujuran dan ketulus ikhlasan melaksanakannya dengan konsekuen dan kon-sisten, agaknya di sinilah letak ke "usreg"an (crucial points)nya.

Baik tentang keterbukaan yang arif dan patut maupun integrasi nasio-nal, masih perlu diwaspadai, di sam-ping tetap berkewaspadaan nasional secara makro. Bagaimanapun kita tak akan mentolerir pelanggaran dan gangguan atas persatuan dan kesatuan serta atas kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam membudayakan keterbukaan yang kberkearifan dan berkepatut-an ada yang patut kita catat dari media massa sebagai berikut:

— POJOK KOMPAS tanggal 2-1-91 :

Mang usil memberikan komentar atas pertanyaan Menko Poikam bahwa keterbukaan bukan "lip service" dengan : "Jika bukan 'lip service', apakah termasuk 'motor car service', kok sering ada yang diketok, . . .?"

— POJOK KOMPAS tanggal 5-2-91 :

Mang usil berkomentar atas kesediaan Kapolda berdialog dengan Dewan Kesenian Jakarta dengan: "Apapun hasilnya, berkomunikasi setidaknya membuat saling mengenal."

— POJOK KOMPAS tanggal 6-1-91 :

Mang usil menanggapi ucapan

Menpen yang berbunyi keterbukaan merupakan strategi tepat untuk menghadapi globalisasi informasi dengan : "Menghadapi apapun, keterbukaan adalah yang paling baik."

- FILM SINETRON TVRI "Aksara Tanpa Kata" juga memasak drama kehidupan menghadapi modernisasi yang penuh ketertutupan, kesewenang-wenangan dan kesepihakan.

Doktor Alfian dan Pangab menjelang tahun 1991 pun masih berbicara tentang keterbukaan.

- Dr. Alfian yang peneliti di LIPI misalnya dalam kesempatan memberikan masukan untuk Seminar TNI-AD tanggal 15-18 Desember 1990 menyatakan:

Bahwa untuk mengembangkan budaya politik Demokrasi Pancasila perlu diwujudkan kemandirian mental setiap individu. Itu akan terwujud apabila tercipta suasana kebebasan mengeluarkan pendapat dan berbeda pendapat, walau tetap dijiwai rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

Bahwa pada sisi lain suasana keterbukaan yang wajar dan sehat antara lain dapat diwujudkan melalui kebebasan untuk saling menyampaikan dan memperoleh informasi, mengemukakan dan menerima aspirasi, serta saling mengembangkan pemikiran yang kritis dan kreatif.

Dan dalam berbagai ekspresi yang cukup sering meledak-ledak serta vokal dan penuh subyek-

tivitas, sudah banyak kita dengar dari lingkungan para seniman, terutama atas "Kasus Opera Ke-coa".

- Pangab sendiri di hadapan 50 peserta Kursus Sospol ABRI Angkatan III di Bandung bahkan masih mengisyaratkan agar aparat pemerintah serta seluruh kekuatan sosial politik semakin terbuka dalam konteks Demokrasi Pancasila (KOMPAS, 31-12-1990) dalam judul PANGAB : MASYARAKAT MAJLH INGINKAN PENINGKATAN SUASANA KETERBUKAAAN).

Dalam pada itu integrasi nasional yang masih amat tergantung kepada pembangunan aspek/gatra ekonomi pun masih ada ganjalan. Khususnya terhadap potensi ekonomi yang sebagian besar masih dipegang oleh ethnic Cina.

Untuk menghadapi himbauan Presiden Suharto tentang asimilasi dan integrasi WNI keturunan Cina, adalah arif dan patut manakala kita semua berbuat terbaik, sehingga Cina di Indonesia berjiwa kesatria yang loyal serta penuh pengorbanan sebagaimana dalam "Mahabharata" cq "Bharata Yudha" diaktualisasikan oleh tokoh ADIPATI KARNA dari Awangga, negara bagian Astinapura." Karena lahir, dibesarkan, makan beras dan minum air Astina, maka HARUS kepada Astinalah dia mengorbankan pengabdian dan jiwa raganya. . ."

Dengan Skep Menteri Dikbud

No. 100 tahun 1991, maka ke"us-reg"an dan menggajalnya masalah jilbab di sekolah, telah putus tuntas. Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam siaran pers/televisinya menyebutkannya sebagai "produk sikap kearifan dan kebijaksanaan" semua pihak.

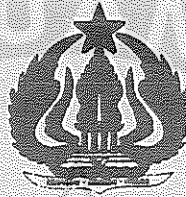
Dekan PTIK dalam setiap audiensi tentang pendidikan selalu menegaskan bahwa sepanjang hayat dikandung badan kita selalu mempunyai permasalahan, dan kearifan kitalah yang justru ditantang untuk mengatasinya. Masalah jilbab yang begitu rawan telah tuntas; mengapa juga tidak segera memfokuskan diri kepada permasalahan "kunci" lainnya misalnya integrasi bersama ethnic Cina, per"lahan"an (bukan sekedar masalah pertanahan), integralitas pendidikan dengan ketenagakerjaan, penataan budaya keterbukaan; dan bahkan mungkin juga integrasi yang tulus di lingkungan ABRI berikut korsa-korsa yang ada di dalamnya.

Sejak dikukuhkan sebagai Kapolri, Letjen Pol. Drs. Kunarto telah mencanangkan pendekatan "kasih sayang" dalam tugas serta di lingkungannya. Dan kepada PTIK, dalam acara tatap muka secara "ayah-

anak sekaligus selaku sesama keluarga besar Garbha Wiyata Luhur Bhayangkara" tanggal 26 Maret yang baru lalu diisyaratkan betapa besar peran penting PTIK, yakni sebagai "dapur pemikiran" untuk melahirkan konsepsi profesionalisme yang baik ("sing becik", istilah kapolri). Baik dalam pengelolaan pendidikan terlebih-lebih penting lagi untuk kepentingan tugas pelayanan di lapangan. Isyarat dari hati ke hati tersebut menyiratkan pula adanya kenyataan bahwa kita ini adalah produk pendahulu kita dan Polri menjadi begini sekarang ini adalah juga produk bangsa/masyarakat kita. Oleh sebab itu "marilah kita berupaya menjadi Polisi yang baik. . ." Kapolri telah secara "terbuka" serta akrab mengetengahkan harapannya. Kearifan kita serta sikap bijaksana kita ditantang untuk menerjemahkannya secara patut di bawah kepemimpinan beliau. Diungkapkannya bahwa sebenarnya kita semua ini "sudah tahu" bagaimana memecahkan permasalahan kita (termasuk PTIK); tinggal ibarat "suwe mijet wohing ranti" (lebih sulit memencet buah ranti yang empuk). Semoga demikian !

Catatan :

- 1) Brigjen TNI A.S.S. Tambunan SH, FUNGSI SOSIAL POLITIK ABRI, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta 1980, halaman 14.
- 2) Abdul Salam, PAGODA KERTAS, Yay. Pancasila Sakti, Jakarta 1984, kesimpulan.
- 3) Skep Kapolri No. Pol: Skep/51/X/1979, BUKU SAKU PENGETAHUAN DASAR ANGGOTA POLRI DI LAPANGAN, Mabes Polri 1979, halaman 37.
- 4) Ibid, halaman 36;
- 5) ALMANAK KEPOLISIAN RI 1988-1990, PT. Dutarindo Adv, Jakarta 1987 hal. XX.
- 6) TOLOK UKUR KONDISI KETAHANAN NASIONAL, Lemhannas Jakarta 1989, halaman 33 s/d lampiran I & II.
- 7) Kapolri, PTK MENATAP MASA DEPAN, Mabes Polri 13-5-1989, halaman 21-22.
- 8) PIDATO PRESIDEN 16-8-1987, LAHIRNYA KONSEP ASIMILASI, Yay. Tunas Bangsa, Jakarta 1977, halaman 151.
- 9) F.M. Parapat, Ph.D., IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL, Pidato Dies ke-25 Lemhannas 22-5-1990, halaman 25.
- 10) Dr. Th. Pigeaud, JAVAANS-NEDERLANDS HANDWOORDENBOEK, Batavia 1937, hal. 256.
- 11) Mpu Tantular, SUTASOMA, dalam buku DWIWINDU LEMHANNAS, 1981, halaman 333.



Pengurus dan Staf
MAJALAH BHAYANGKARA.

Mengucapkan

DIRGAHAYU AJB BUMIPUTERA 1912
yang ke-79

12 FEBRUARI 1991.

Semoga Sukses.

RUANG PUSTAKA

1. Bahreisy, Hussein.

Himpunan pengetahuan Islam : 450 masalah agama Islam
oleh Hussein Bahreisy.— Surabaya: Al Ikhlas; 1980
xiv, 229 hal. : 20 cm.

Buku ini dengan judul Himpunan Pengetahuan Islam:450 masalah Agama Islam yang membahas ke Islaman dengan cara yang praktis dan mudah dipahami dalam Bahasa Indonesia. Adapun isinya berasal dari sumber-sumber ke islamian yang dapat di pertanggung jawabkan yaitu dari Qur'an dan Hadist Nabi serta dari hasil Ijtihad. Pemikiran ke islamian yang di gali oleh mereka dengan Rasional.

2. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Naskah Sementara tentang Kamus istilah dan singkatan
ABRI.— Jakarta : 1989.

Naskah sementara tentang kamus istilah dan singkatan ABRI, dan penggunaan istilah serta singkatan yang baku dalam suatu, organisasi seperti halnya di lingkungan ABRI, mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung secara tepat. Tercapainya pelaksanaan tugas pokok organisasi khususnya, yang menyangkut pembinaan dan penggunaan kemampuan ABRI, sehingga mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Untuk itu sejalan dengan perkembangan dan kemajuan keadaan di segala bidang. ABRI memandang perlu membebani istilah dan singkatan yang berlaku serta di gunakan di lingkungannya.

3. Maskat, Djunaidi.

Pengetahuan praktis berlalu lintas di jalan Raya : dan
cara mengurus SIM, STNK, Asuransi Korban kecelakaan
lalu lintas Jasa Rahardja/Djunaidi Maskat H.— Bandung,
1988.

iii, 95 hal. : Ilus. : 24 cm.

Pengetahuan praktis berlalu lintas di jalan raya. Buku ini berisikan
untuk menyebar luaskan pengetahuan berlalu lintasan kepada warga

Polri & Masyarakat, dan dapat membantu mempermudah dalam mempelajari peraturan-peraturan lalulintas jalan secara praktis. Mulai dari pengemudi mempersiapkan kendaraannya mengemudikan menjalankan kendaraannya, sampai menghentikan kendaraan di samping itu di sampaikan perambuan, cara mengurus SIM, STNK, santunan asuransi lalulintas jasa raharja, serta peta pulau-pulau yang penting di Indonesia karena hal tersebut sangat penting di ketahui oleh pengemudi.

4. Maskat, H Djunaidi

Teknik membuat karangan militer (Karmil)/Djunaidi H Maskat.— Lembang : Mandira Buana, 1990.
89 hal. : Ilus, 28 cm.

Teknik membuat karangan militer (Karmil) berisikan untuk kebutuhan di lapangan, maupun bimbingan bagi mereka yang akan mengikuti test masuk sespimpolri.

Khususnya dalam mengembangkan inovatif dan kreatif para Perwira, yang ingin berkarya memecahkan masalah di kesatuannya. Sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi secara lebih efisien. Isi buku ini dititik beratkan bagaimana cara membuat karmil, dengan mengikuti langkah-langkah atau proses pembuatan karmil, disamping itu diberi contoh mulai mendapatkan masalah, sampai contoh Karmil yang sudah jadi.